

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tuntutan terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja dari sektor publik dalam hal ini instansi pemerintah semakin meningkat sejak masa reformasi politik tahun 1998. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan. Tuntutan yang semakin tinggi terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka, dengan kata lain kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, dikarenakan masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah. Dalam menjawab tuntutan masyarakat terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja, pemerintah melahirkan berbagai peraturan perundang – undangan, kebijakan dan tindakan nyata dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kinerja pemerintah merupakan hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran antara kuantitas dan kualitas terukur (PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah).

Beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat peningkatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik diantaranya UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Negara dan Kinerja Instansi dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas tersebut dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, oleh karena itu baik pemerintah pusat maupun daerah harus dapat memberikan informasi secara tepat waktu, relevan, akurat, dapat diandalkan dan konsisten mengenai kegiatan dan kinerja keuangan yang diperlukan. Informasi yang lebih cepat dan akurat disediakan atau diberikan oleh instansi pemerintah akan berdampak positif bagi instansi tersebut. Contohnya seperti Pemerintah Kabupaten Sleman, prestasi yang pertama dimana Pemerintah Kabupaten Sleman meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan DIY atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan tahun anggaran 2018. Pemerintah Kabupaten Sleman merupakan kabupaten ke-4 seIndonesia yang telah menerima opini WTP, bahkan ini merupakan yang ke-8 kalinya diraih Pemerintah Kabupaten Sleman. Kepala BPK Perwakilan DIY Yusnadewi menjelaskan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemkab Sleman Tahun Anggaran 2018, BPK memberikan opini WTP, meskipun demikian masih ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki. Namun,

beberapa catatan itu tidak mempengaruhi material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Bupati Sleman, Bapak Sri Purnomo juga mengatakan dengan capaian opini WTP menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Sleman sudah sesuai tata kelola keuangan, bersih, akuntabel dan transparan dan sedangkan beberapa rekomendasi dari BPK sudah ditindaklanjuti.

Prestasi kedua yang diperoleh Kabupaten Sleman adalah Keberhasilan Kabupaten Sleman meraih Predikat “A” dalam Implementasi SAKIP selama 2 tahun berturut-turut. Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan keberhasilan sleman meraih nilai A dalam SAKIP dua tahun berturut-turut ini adalah buah dari kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas seluruh jajaran birokrasi Pemerintah kabupaten sleman, yang dinakhodai komitmen yang tinggi pimpinan daerah terhadap akuntabilitas kinerja, dijelaskan Sri Purnomo jika komitmen tersebut diimplementasikan dalam berbagai langkah yang telah dilakukan. Berbagai upaya tersebut yaitu penyelarasan dokumen, perencanaan daerah, membangun integrasi sistem pendukung akuntabilitas kinerja, penyusunan dan penerapan proses bisnis, penetapan dan fokus pembangunan. Di samping itu mendorong dan melaksanakan perwujudan efisiensi, *refocussing* program dan kegiatan, menciptakan inovasi terus menerus, penyiapan SDM berkualitas di garda terdepan maupun akuntabilitas kinerja, langkah perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi yang diselenggarakan dengan berorientasi pada hasil dan dapat dipertanggungjawabkan telah membawa Kabupaten Sleman sebagai salah satu pemerintah daerah di barisan terdepan kualitas SAKIP. Ia juga mengatakan, dalam implementasi SAKIP tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Sleman meraih nilai

81,99. Angka tersebut mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu 81,72. Pada kesempatan tersebut Tjahjo Kumolo menyampaikan, evaluasi SAKIP dapat memetakan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, langkah ini merupakan hasil implementasi manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja secara berkesinambungan. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2019 yang telah disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memperoleh predikat “A”, nilai 81,99 dengan interpretasi: memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel”. Adapun perkembangan hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Sleman mulai tahun 2012-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sleman

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nilai	65,29	66,35	70,64	76,90	77,89	78,06	81,72	81,99
Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	BB	BB	BB	A	A

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2019

Nilai dan kategori predikat dalam SAKIP juga menjadi gambaran kemampuan instansi dalam mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran, menetapkan ukuran target kinerja yang jelas dan menghemat anggaran melalui kegiatan yang berdampak langsung bagi pencapaian sasaran pembangunan.

Di sisi lain, ada beberapa kinerja Pemkab Sleman tahun 2020 jika dibandingkan dengan pencapaian 2019. Pada tahun 2020, terdapat 7 (tujuh)

indikator kinerja sasaran yang belum berhasil mencapai target, yaitu (1) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, (2) Indeks Gini, (3) Lama Tinggal Wisatawan Nusantara, (4) Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan, (5) Tingkat Pengangguran Terbuka, (6) Persentase KK Miskin, dan (7) Persentase Penduduk Miskin. Dari 7 (tujuh) target yang belum tercapai tersebut, 6 (enam) diantaranya merupakan dampak langsung dari pandemi COVID-19. Menurut Ariyandani, dkk (2020) ketidaktercapaian sasaran kinerja oleh pemerintah dipengaruhi oleh Kejelasan Sasaran Anggaran, Komitmen Organisasi, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan. Berdasarkan penjelasan Bapak Sri Purnomo selaku Bupati Sleman, salah satu faktor keberhasilan Sleman dalam meraih predikat A untuk SAKIP dua tahun 2018-2019 dan dengan pencapaian opini WTP menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Sleman juga dipengaruhi oleh tata kelola keuangan, bersih, akuntabel dan transparan adalah komitmen yang tinggi pimpinan daerah terhadap akuntabilitas kinerja. Penjelasan tersebut menunjukkan pentingnya menguji pengaruh factor apa saja yang dapat mempertahankan efektivitas penerapan SAKIP, sehingga mampu mengatasi penurunan kinerja sasaran di Pemerintah Kabupaten Sleman, khususnya pada periode pandemic COVID-19 yang menyebabkan 7 indikator kinerja tidak tercapai di Pemerintah Kabupaten Sleman.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pratama, dkk (2019) pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan bahwa Pengendalian Akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Sistem Pelaporan juga berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah sedangkan Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Betta dan Arza (2020) pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Solok menunjukkan bahwa komitmen perangkat daerah berpengaruh terhadap efektivitas penyelenggaraan SAKIP, sedangkan peran APIP dan budaya organisasi tidak mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan SAKIP. Penelitian terdahulu yang dilakukan Tahir, dkk (2016) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa kesadaran pada peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAKIP, sedangkan Komitmen organisasi dan peran APIP berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAKIP. Penelitian terdahulu yang dilakukan Anjarwati (2012) pada 51 SKPD di wilayah Tegal dan Pemalang menunjukkan bahwa Kejelasan sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian terdahulu yang dilakukan Precelina dan Wuryani (2019) pada Pemerintah Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa Kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan sistem pelaporan berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian terdahulu yang dilakukan Fauzan (2017) pada SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan penerapan akuntabilitas keuangan semua berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian

terdahulu yang dilakukan Arjuna dan Putri (2019) pada OPD Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa Komitmen organisasi, budaya organisasi, pelatihan dan gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Penelitian terdahulu yang dilakukan Hafiz (2017) pada SKPD Kabupaten Kampar dengan komitmen organisasi dan kinerja manajerial sebagai variabel moderating menunjukkan bahwa yang pertama kompetensi aparatur, peraturan perundangan, kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kedua Komitmen Organisasi memperkuat pengaruh kompetensi aparatur, ketaatan pada peraturan perundang-undangan, kejelasan sasaran anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang ketiga Kinerja Manajerial memperkuat pengaruh kompetensi aparatur, ketaatan pada peraturan perundangan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Murdi dan Putri (2020) pada Kota Payakumbuh menunjukkan bahwa Pedoman SAKIP tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerapan SAKIP, Komitmen Pemerintah Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas penerapan SAKIP, Budaya Kerja tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerapan SAKIP dan Peran APIP berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas penerapan SAKIP. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ariyandani,dkk (2020) pada Kecamatan Mariso Kota Makassar menunjukkan bahwa secara simultan kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja dan secara parsial yang berpengaruh dominan terhadap akuntabilitas kinerja adalah sistem pelaporan. Penelitian yang dilakukan Setiawan,dkk (2013) pada Pemerintah Kabupaten

Pelalawan, dalam penelitian ini hasil yang diperoleh adalah Kejelasan Sasaran anggaran dan Pengendalian Akuntansi berpengaruh signifikan sedangkan sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Maka dari itu peneliti mengambil variabel Kejelasan Sasaran Anggaran, Komitmen Organisasi, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan dikarenakan sesama variabel tersebut saling berkaitan dan memiliki peran penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi SAKIP. Salah satunya komitmen organisasi, komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada berbagai aspek pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dituangkan dalam UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari KKN. Komitmen ini sudah menjadi agenda yang harus dilaksanakan guna tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik. Lalu dengan adanya pengendalian akuntansi maka instansi pemerintah dapat mengontrol dan menilai seluruh aktivitas dan tanggung jawab yang dilakukan instansi tersebut. Pengendalian akuntansi dapat menilai apakah kegiatan yang dilaksanakan pemerintah tersebut telah ekonomis, efisien dan efektivitas pelayanan dari instansi pemerintah daerah kepada masyarakat, ini merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah daerah. Tercapainya indikator tersebut merupakan suatu prestasi yang dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang bersangkutan. Hal lain yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sistem pelaporan, sistem pelaporan merupakan laporan yang

menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan ke atasan. Faktor lainnya yang juga mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kejelasan sasaran anggaran, yang merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, motivasi penelitian ini ialah untuk menguji kembali variabel dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan faktor apa sajakah yang mempengaruhi efektivitas penerapan SAKIP di Kabupaten Sleman. Maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Komitmen Organisasi, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Efektivitas penerapan SAKIP pada Pemerintah Kabupaten Sleman”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang mengenai masalah di atas, Prestasi yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Sleman adalah salah satunya merupakan Kabupaten keempat seIndonesia yang telah menerima opini WTP oleh BPK, bahkan ini merupakan yang ke delapan kalinya. Prestasi yang kedua adalah keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sleman meraih predikat “A” dalam Implementasi SAKIP selama dua tahun berturut-turut, Di sisi lain, ada beberapa kinerja Pemkab Sleman tahun 2020 jika dibandingkan dengan pencapaian 2019. Pada tahun 2020, terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran yang belum berhasil mencapai target, yaitu (1) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, (2) Indeks Gini,

(3) Lama Tinggal Wisatawan Nusantara, (4) Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan, (5) Tingkat Pengangguran Terbuka, (6) Persentase KK Miskin, dan (7) Persentase Penduduk Miskin. Dari 7 (tujuh) target yang belum tercapai tersebut, 6 (enam) diantaranya merupakan dampak langsung dari pandemi COVID-19, inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Peneliti ingin menguji apakah faktor-faktor di atas berperan penting dan berpengaruh terhadap efektivitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap efektivitas penerapan SAKIP?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap efektivitas penerapan SAKIP?
3. Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap efektivitas penerapan SAKIP?
4. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap efektivitas penerapan SAKIP?

1.3. Tujuan Penelitian

Menguji kembali dengan variabel penelitian terdahulu mengenai efektivitas penerapan SAKIP di Kabupaten Sleman yang diharapkan berdampak positif terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan untuk penelitian selanjutnya mengenai keberhasilan implementasi SAKIP. Sehingga dapat menjadi referensi baru untuk penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut atau sejenis. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi generalisasi pada penelitian sejenis dengan menggunakan objek yang berbeda

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam penyusunan SAKIP. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja OPD dalam mempertahankan atau bahkan meningkatkan keberhasilan dalam implementasi SAKIP melalui rekomendasi berdasarkan hasil penelitian ini.